

## Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjaga Identitas Nasional

Naura Salsabila<sup>1</sup>, Sofia Ramadhani<sup>2</sup>, Zahwatun Habibah<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Samudra

<sup>1</sup>[naurasalsabillll@gmail.com](mailto:naurasalsabillll@gmail.com), <sup>2</sup>[Hzahwatun@gmail.com](mailto:Hzahwatun@gmail.com), <sup>3</sup>[ramadhanisofya@gmail.com](mailto:ramadhanisofya@gmail.com)

### Abstrak

Civic education plays a crucial role in maintaining national identity. In the context of Indonesia, which is rich in cultural and ethnic diversity, civic education serves as a forum for instilling national values and collective awareness. This study aims to identify how civic education can contribute to strengthening national identity. The methods used are literature studies and qualitative analysis of various relevant sources. The results of the study indicate that civic education can strengthen the sense of nationality and national unity, but also requires adjustments to deal with the ever-evolving social and cultural dynamics.

### Keyword

citizenship education, nation, indonesian, nationalism

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).



### Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran besar dalam menjaga identitas nasional. Indonesia memiliki keragaman budaya dan suku, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berkontribusi dalam memperkuat identitas nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan nasional, namun juga memerlukan penyesuaian untuk menghadapi dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang.

### Keywords

Indonesia, kebangsaan, warga negara, nasionalisme

## Pendahuluan

Identitas nasional merupakan fondasi yang kuat dalam membangun dan mempertahankan sebuah negara. Identitas tersebut mencakup nilai-nilai, budaya, sejarah, dan keyakinan bersama suatu bangsa. Menjaga dan mempertahankan identitas nasional menjadi tantangan yang semakin penting. Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam menjaga identitas nasional(Anatasya, 2025).

Pendidikan kewarganegaraan menjadi semakin relevan sebagai sarana untuk memperkuat identitas nasional dan menanamkan rasa bangga akan kebudayaan dan nilai-nilai bangsa sendiri. Pendidikan yang efektif dapat membantu peserta didik memahami dan menghargai warisan budaya mereka, serta mengembangkan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas nasional yang lebih luas. Namun, implementasi pendidikan kewarganegaraan tidak selalu berjalan mulus.

Tantangan dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan mencakup kurangnya pelatihan dan sumber daya bagi guru, materi kurikulum yang mungkin kurang relevan atau tidak menarik bagi siswa, serta disparitas dalam penerapan kurikulum di berbagai daerah. Guru, sebagai ujung tombak pendidikan, sering kali dihadapkan pada tugas berat untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak dan memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif dan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan tercapai (Azil et al., 2024)

Beberapa studi telah membahas kajian tentang peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menjaga identitas nasional. Pertama (Azil et al., 2024) yang membahas tentang peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun identitas nasional. Kedua, (Raharjo et al., 2024) membahas tentang pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Ketiga, (I wayan., 2017) membahas tentang sejarah perjalanan pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum di Indonesia dan yang terakhir, (Shela et al., 2021) membahas tentang tantangan pembelajaran PKn di Era 4.0. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun identitas nasional di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana pendidikan tersebut diimplementasikan di sekolah-sekolah dan sejauh mana efektifitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

## **Metode**

Metodologi yang digunakan adalah studi literatur yang diambil dari beberapa sumber yaitu buku, artikel dan jurnal yang didapat dari google scholar. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola dan praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk memperkuat peran PKn dalam membentuk identitas nasional di tengah tantangan globalisasi dan keragaman sosial budaya.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Konsep Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teori-teori pendidikan kewarganegaraan yang relevan mencakup konsep-konsep seperti kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan kritis, dan pendidikan demokrasi (Azil et al., 2024).

#### **a. Kewarganegaraan Aktif**

Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan publik. Warga negara yang aktif tidak hanya memahami hak-hak mereka tetapi juga berpartisipasi dalam proses politik, sosial, dan ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan sikap proaktif dan keterampilan yang dibutuhkan untuk terlibat dalam masyarakat, seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan kolaborasi.

#### **b. Kewarganegaraan Kritis**

Konsep ini menekankan pentingnya analisis kritis terhadap struktur sosial dan politik. Pendidikan kewarganegaraan yang kritis mengajarkan siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk mempertanyakan, menganalisis, dan memahami kekuatan yang membentuk masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok.

### c. Pendidikan Demokrasi

Fokus utama dari teori ini adalah mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan praktik demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi, seperti kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, berdialog dengan baik, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif.

Menurut dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) Implementasi teori-teori ini dalam kurikulum PKn dapat membantu menciptakan warga negara yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga aktif dan kritis dalam menghadapi tantangan masyarakat modern. Melalui pendidikan yang komprehensif, siswa diharapkan dapat memahami dan menghargai peran mereka dalam menjaga dan memperkuat demokrasi serta identitas nasional.

## Kurikulum PKn di Indonesia

### a. PKn dalam Kurikulum 1947

Menurut (Raharjo, 2024) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) perlu diketahui, bahwa kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950.

Pada tahun 1947 ini kelompok kerja yang bertugas menyusun konsep pendidikan, telah merumuskan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional pada saat itu adalah untuk mendidik warga Negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara dan masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan nasional pada masa itu menekankan pada penanaman semangat dan jiwa kepahlawanan (patriotisme).

### b. PKn dalam Kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, dimana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Menurut (Raharjo, 2024) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) kaitannya dengan PPKn, di kurun waktu berlakunya kurikulum ini, bahwa di tahun 1959/1960an ketika gegap gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan mata pelajaran Civics dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini ditandai

dengan adanya satu buku terbitan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) yang berjudul “Civics, Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru”, karangan Mr. Soepardo, dan kawan-kawan.

**c. PKn dalam Kurikulum Rentjana Pendidikan 1964.**

Pada tahun 1964 terjadi perubahan kurikulum. Pendidikan ideologi yang difokuskan pada Manipol-USDEK, Nasakom, dan semangat revolusi. Menurut (Raharjo, 2024) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) mata pelajaran Kewarganegaraan yang meliputi materi sejarah, ilmu bumi, dan kewargaan negara (nama baru civics) menjadi penting untuk mengembangkan pendidikan ideologi dan dimasukkan dalam struktur kurikulum dengan nama Perkembangan Moral.

**d. PKn dalam Kurikulum 1968**

Menurut (Santika et al., 2018) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Pembuatan Kurikulum 1968 bertujuan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dibentuk oleh Orde Lama. Dalam Kurikulum 1968, pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia dengan ideologi Pancasila yang sehat secara jasmani maupun rohani serta memiliki kecerdasan dan keterampilan.

Perkembangan berikutnya, mata pelajaran Civics yang kemudian diganti menjadi Kewargaan Negara pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak. Kajian Pendidikan Kewargaan Negara untuk masing-masing jenjang berbeda-beda kekompleksannya. Untuk jenjang sekolah dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi. Untuk jenjang SMP, Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran isinya Sejarah Kebangsaan (30%), Kejadian setelah Indonesia merdeka (30%), dan UUD 1945 (40%). Untuk jenjang SMA, Mata Pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara meliputi program pembelajaran sebagian besar terdiri atas UUD 1945.

**e. PKn dalam Kurikulum 1975.**

Menurut (Tarbiyah et al., 2018) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) pada Kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4.<sup>2</sup> Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan.<sup>2</sup> Menurut (Khoirurrijal et al., 2022) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) mata pelajaran PMP identik dengan pemerintahan Orde Baru. Kemudian mata pelajaran tersebut telah berganti nama menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan”. Selanjutnya PMP mulai dipelajari di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975.

#### **f. PKn dalam Kurikulum 1984**

Perubahan Kurikulum 1975 menjadi Kurikulum 1984 secara tidak langsung juga menimbulkan masalah bagi pelaksanaan kegiatan pengajaran PMP. Kekacauan ini timbul karena upaya Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu (1983-1985), yang bersikeras memasukkan pelajaran Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa (PSPB) ke dalam Kurikulum 1984. Materi baru ala Nugroho ini menimbulkan kontroversi karena dinilai tumpang tindih dengan pelajaran Sejarah Nasional dan PMP. Setelah Nugroho wafat pada tahun 1985, kekacauan dalam mata pelajaran PMP baru diakui oleh Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. “Terus terang saya katakan, saat ini terjadi tumpang tindih antara P4, PSPB, PMP, dan Sejarah Nasional. Tumpang tindih tersebut akan mengakibatkan hilangnya waktu yang bisa dipakai untuk keperluan lain, atau mendesak mata pelajaran lain.

#### **g. PKn dalam Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999**

Menurut (Trisna, 2020) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) Kurikulum 1994 pada dasarnya dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn Kurikulum 1994 adalah merupakan: ”Wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warganegara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Kepadatan isi kurikulum 1994 dapat dilihat pada banyaknya mata pelajaran dan juga substansi dari setiap mata pelajaran. Penyempurnaan yang lain adalah dalam hal materi yang kurang sesuai, baik dengan tahap perkembangan anak maupun dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan iptek. Kurikulum yang berlaku dianggap kurang mengakomodasi keragaman potensi peserta didik, aspirasi dan peran serta masyarakat.

#### **h. PKn dalam Kurikulum 2004.**

Menurut (Khatimah et al., 2022) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) pada tahun 2004, yaitu berlakunya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBP) muncul paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral /filsafat Pancasila dan memiliki visi yang kuat nation and character building, citizen empowerment (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan civil society (masyarakat kewargaan). Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKn (PPKn), yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim (hegemoni penguasa), memiliki visi untuk memperkuat state building (negara otoriter birokratis; kooptasi negara) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau obyek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa.

Menurut (Santika, 2021) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) akibat dari kondisi ini, PKn semakin sulit untuk mengembangkan karakter warga negara yang

demokratis, sehingga menjadi lahan subur bagi berkembangnya otoriterisme. PKn paradigma baru ini sering dikenal sebagai PKn yang bermutu. Dikatakan PKn yang bermutu karena memiliki pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat demokratis, memiliki ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), karakter kewarganegaraan (civic dispositions) yang mampu untuk mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara dan masyarakat kewargaan.

**i. PKn dalam Kurikulum 2006**

Pada tahun 2006 dibentuklah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang dikenal dengan sebutan KTSP. Perubahan kurikulum ini dilakukan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP sudah disesuaikan dengan sistem pendidikan di Indonesia.

**j. PKn dalam Kurikulum 2013 dan 2013 Revisi**

Menurut (Abdullah, 2007) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan Kurikulum 2013. Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn dengan rincian sebagai berikut.

1. Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
2. Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan.
3. Mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh.
5. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.

**k. PKn dalam Kurikulum 2020 (Kurikulum Merdeka).**

Mendikbud Nadiem menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai Profil Pelajar Pancasila. Menurut (Marisa, 2021) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) adapun enam profil tersebut adalah pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Ketiga, adalah kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya.

## **Konsep Identitas Nasional**

### **1. Pengertian Identitas Nasional**

Menurut (Azra, Dkk, 2008) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) Identitas berasal dari kata identity (Inggris) yang diserap oleh Bahasa Indonesia menjadi kata identitas. Identitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan Nasional berasal dari kata nation (Inggris) atau natie (bahasa Belanda) yang berarti Bangsa. Nasional dalam KBBI berarti kebangsaan yang meliputi segala hal tentang suatu bangsa yang berkaitan dengan kebudayaan hingga cita-cita bangsa.

Identitas nasional diartikan sebagai ungkapan nilai-nilai budaya yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (collective action yang diberi atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk pola perilaku, lambang-lambang, alat kelengkapan dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Tilaar (2007) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena dari padanya seorang individu memperoleh realitasnya. Sedangkan menurut Soedarsono (2003) identitas nasional merupakan jati diri bangsa. "Jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya." Jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Jati diri sebuah bangsa dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Jati diri bangsa Indonesia ialah Pancasila dan UUD NRI 1945.

Lebih lanjut, Kaelan (2007) mengemukakan bahwa identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) dengan ciri khas masing-masing. Ciri-ciri yang khas tadi yang dimiliki oleh suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia.

### **2. Unsur – Unsur Identitas Nasional**

Terdapat beberapa unsur yang membangun Identitas Nasional Indonesia. Hal ini merujuk pada Indonesia sebagai bangsa multikultural/majemuk. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari sisi sejarah, suku bangsa, kebudayaan, bahasa dan agaman (Sari, 2025). Sejarah Indonesia sebelum menjadi sebuah negara, terlebih dahulu dikenal dengan nama kerajaan yang mengalami masa kejayaan pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pada masa itu Indonesia dikenal dengan pusat-pusat kerajaan Nusantara yang pengaruhnya menembus batas teritorial dimana dua kerajaan itu berada. Semangat juang kebesaran dua kerajaan tersebut membekas sampai masa perjuangan ketika Indonesia masuk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Semangat juang para Pahlawan Indonesia menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia sehingga menjadi salah satu unsur identitas nasional.

Suku Bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Agama, Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.<sup>3</sup> Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

## **Peran PKn**

Studi literatur menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun pemahaman dan penghargaan siswa terhadap identitas nasional. Melalui kurikulum PKn, siswa diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar mengenai kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta nilai-nilai kebangsaan yang esensial.

### **1. Pemahaman Identitas Nasional**

PKn memainkan peran penting dalam memperkenalkan siswa pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk identitas nasional. Pengetahuan tentang pahlawan nasional, peristiwa sejarah penting, dan simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan membantu siswa mengembangkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap tanah air.

### **2. Penghargaan terhadap Keberagaman**

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan agama. PKn membantu siswa mengenali dan mengapresiasi keberagaman ini sebagai kekayaan nasional. Melalui pembelajaran yang mencakup diskusi tentang toleransi, kerukunan, dan gotong royong, siswa diajak untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Pendidikan yang menekankan pentingnya menghormati keberagaman juga berkontribusi pada pencegahan konflik sosial dan memperkuat kohesi sosial.

### **3. Pembentukan Rasa Kebangsaan**

Menurut (Edi, 2021) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) PKn juga berperan dalam membentuk rasa kebangsaan dan nasionalisme di kalangan siswa. Dengan memahami sejarah perjuangan bangsa dan pentingnya persatuan, siswa diharapkan mengembangkan sikap cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga

negara. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif mampu menanamkan nilai-nilai patriotisme dan komitmen untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa.

### **Tantangan dalam PKn**

Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan pada Era Revolusi 4.0:

1. Di era 4.0 menantang kekuatan penerapan unsur jati diri bangsa Indonesia melalui budaya luar sekolah terutama media sosial. Para siswa lebih tertarik dengan budaya baru yang diperlihatkan oleh media luar sekolah terutama sosial media dibandingkan dengan budaya kita sendiri.
2. Media sosial telah memporak porandakan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sehingga siswa sering berperilaku tidak sesuai dengan budaya kita. dengan adanya media sosial yang bebas banyak menyita perhatian para siswa sehingga pelajaran menjadi terganggu.
3. Informasi yang ada di media sosial ini terdapat banyak informasi yang salah atau tidak benar. Hal ini mempengaruhi karakteristik anak bangsa.
4. Dalam media sosial sangat sedikit nuansa pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk mengimbangi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, maka perlu dibuat konten yang sama menariknya yang sarat akan nilai-nilai kebangsaan.
5. Sistem pembelajaran PKN adalah diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, ditopang oleh sejumlah mata pelajaran lain yang relevan untuk memperkuat aspek tanggung jawab warga negara, dan disempurnakan oleh kegiatan ekstrakurikuler disekolah ataupun diluar sekolah.
6. Pencapaian PKN adalah mendidik warga yang cerdas dan baik (smart and good citizenship). Seharusnya hal ini didukung disekolah dan diluar sekolah, tetapi kenyataannya pencapaian PKN ini dibebankan pada guru PKN, dan belum menjadi tanggungjawab seluruh guru disekolah.

Sesuai dengan apa yang telah disebutkan diatas tenaga pendidik dan orangtua diharapkan dapat dengan bebas bisa menghadapi perkembangan zaman, dan tetap mengutamakan Pendidikan moral dan karakter. Selain dari internet, televisi juga dapat menjadi masalah dalam Pendidikan moral dan karakter suatu generasi penerus bangsa, banyak tontonan yang tidak memberikan manfaat dan tidak sesuai dengan umur dapat memberikan masalah serius dalam moral dan karakter seorang anak.

Orangtua harus memantau kegiatan anaknya dalam menggunakan media hiburan dan informasi, apakah telah sesuai dengan usianya dan bermanfaatkah konten tersebut untuk dilihat.<sup>4</sup> Pendidikan kewarganegaraan saat ini, dinilai kurang bermanfaat untuk melawan arus persaingan di masa Revolusi Industri 4.0. Dalam dunia Pendidikan, kebanyakan orang lebih melihat Nilai Pelajaran daripada nilai moral seseorang, lebih ingin tahu apakah nilainya bagus atau tidak ketimbang memperdulikan apakah nilai tersebut didapatkan dengan jujur atau tidak (Azil et al., 2024).

### **Strategi Efektif dalam Pembelajaran PKn**

Studi literatur mengungkapkan berbagai strategi yang berhasil dalam pengajaran PKn. Strategi-strategi ini dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan.

### **1. Pendekatan Partisipatif**

Pendekatan partisipatif dalam pengajaran PKn melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi kelompok, simulasi, dan proyek-proyek komunitas adalah contoh metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi.

### **2. Integrasi Teknologi**

Integrasi teknologi dalam pengajaran PKn dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran. Penggunaan multimedia, e-learning, dan alat-alat interaktif lainnya dapat membantu menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Teknologi juga memungkinkan akses ke sumber-sumber belajar yang lebih luas dan beragam.<sup>1</sup>

### **3. Kolaborasi antara Sekolah dan Komunitas**

Kolaborasi antara sekolah dan komunitas dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan memperkuat keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan kehidupan nyata. Program-program seperti kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dapat memberikan konteks praktis bagi pembelajaran PKn.

Menurut (Octavian, 2023) dalam jurnal yang ditulis oleh (Azil et al., 2024) dengan mengadopsi strategi-strategi ini, pendidikan kewarganegaraan dapat diimplementasikan secara lebih efektif, sehingga mampu membangun identitas nasional yang kuat dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi PKn, terdapat berbagai cara inovatif untuk mengatasinya dan memperkuat peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun identitas nasional di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat identitas nasional di Indonesia. Dalam konteks keragaman budaya dan suku, PKn berfungsi sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, menghargai keberagaman, dan membangun rasa kebanggaan terhadap tanah air. Melalui kurikulum PKn, siswa diperkenalkan pada sejarah, budaya, dan simbol-simbol negara yang memperkuat rasa cinta mereka terhadap bangsa. Namun, di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, implementasi PKn menghadapi berbagai kendala.

Media sosial dan budaya asing sering kali mengalihkan perhatian siswa dari nilai-nilai lokal yang penting. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif dalam pengajaran PKn, seperti pendekatan partisipatif, integrasi teknologi, dan kolaborasi dengan komunitas. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pendidikan kewarganegaraan tidak

hanya dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang identitas nasional tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, PKn dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat identitas nasional Indonesia di era yang terus berubah.

## Referensi

- Azil, H. A., Najmi, N., Sasmi, N. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Identitas Nasional. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 23-31.
- Raharjo, R., Eka, J., Kusman, R. (2024). *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- I Wayan, K. (2017) Sejarah Perjalanan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum di Indonesia. *Journal of Civic Education*, 1(2).
- Shela, S., Dinie, A., D. (2021). Tantangan Pembelajaran PKn di Era 4.0. *Edumaspul Jurnal Pendidikan*, 5(2), 286-289.
- Anatasya, Sara. dkk. (2025). The Urgency of Citizenship Education In The Contemporary Era. *Jurnal Pengetahuan Sosial Dan Sejarah*, 1(2), 63–73.
- Sari, A. N. dkk. (2025). Pillars of Nationality As Insight of The Archipelago. *Jurnal Pengetahuan Sosial Dan Sejarah*, 1(2), 59–65.